

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM & METODE PENULISAN**

#### **3.1 Gambaran Umum**

##### **Latar Belakang Berdirinya Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu pegawai bernama Arief Nugroho yang bekerja di bagian Akuntansi KKP J.M. Harianto, Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto terletak di Jalan Abdulrahman Saleh No. 31 Semarang, Kantor Konsultan ini didirikan oleh Bapak Juventus Maria Harianto pada tahun 1984.

Bapak J.M. Harianto memulai karir pada tahun 1972 dengan bekerja di salah satu Kantor Konsultan Pajak di Semarang. Selain bekerja di Kantor Konsultan Pajak, Bapak Harianto juga membuka jasa konsultan pajak dirumahnya sendiri yang berada di Jalan Abdulrahman Saleh No. 24. Pada tahun 1976 Bapak Harianto mengikuti ujian Brevet dan berhasil mendapatkan sertifikat Brevet A & B. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984 Bapak Harianto mengikuti ujian Brevet C dan berhasil mendapatkan sertifikat Brevet C yang merupakan Brevet tertinggi dalam kualifikasi untuk menjadi seorang konsultan pajak.

Setelah mendapatkan ketiga Brevet tersebut dan juga sudah menguasai segala aspek bidang perpajakan, akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kantor Konsultan Pajak tempat beliau bekerja dan mulai merintis dengan membuka jasa Konsultan Pajak bersama dengan rekannya Bapak

Heru Martono yang sejak 14 Agustus 1984 sudah terdaftar sebagai konsultan pajak tingkat C.

Kantor Konsultan Pajak JM Harianto yang berlokasi di Jalan Abdulrahman Saleh No. 31 saat ini telah mendapat ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dengan surat keterangan Anggota : KEP-026K/PP.IKPI-C/XI/2010. Selain terdaftar sebagai Konsultan Pajak Tingkat C, Bapak J.M. Harianto juga ditetapkan sebagai ketua pengurus IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Pengda Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 12 November 2014 dengan masa bakti 2014 – 2019, hal tersebut menjadikan Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto terdaftar sebagai salah satu Kantor Konsultan Pajak terbaik di Semarang.

#### **Fungsi Kantor Konsultan Pajak**

Fungsi kantor konsultan pajak antara lain :

1. Sarana untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada Negara.
2. Sarana untuk memudahkan Wajib Pajak dengan berkonsultasi mengenai masalah perpajakan yang tidak bisa diselesaikan sendiri.
3. Sebagai pihak netral antara Wajib Pajak dengan Kantor Pajak saat terjadi permasalahan dalam perpajakannya.

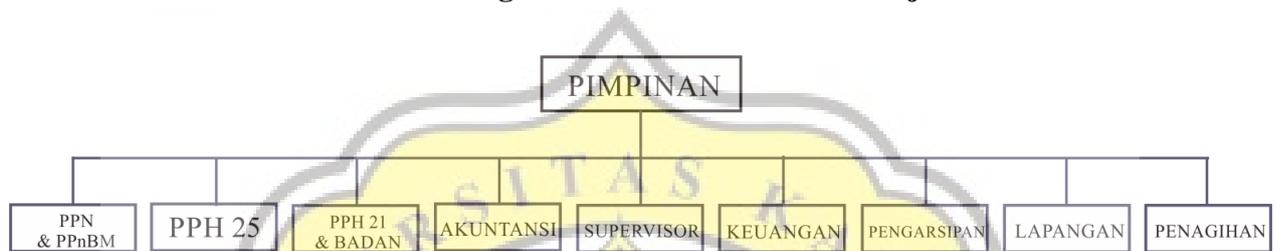
#### **Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto**

Kantor Konsultan Pajak JM Harianto memiliki struktur organisasi yang Horizontal, yang artinya tidak ada struktur jabatan didalam kantor Konsultan

Pajak JM Harianto, hanya Bapak JM. Harianto sendiri yang menjadi pimpinannya.

Bagan struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak JM Harianto sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto**



Sumber : Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto Semarang, Agustus 2019

**Keterangan :**

- Pimpinan : JM. Harianto Slamet, SH
- Supervisor : 1. Yohanes Winarto Adi Nugroho  
2. J. Heru Martono
- Bagian Keuangan : 1. Santi Nugrahaningtyas  
2. Putri Lolalia Pita Loka
- Bagian Akuntansi : 1. Arief Nugroho N.P, A.Md  
2. Ummi Dwi Susanti, SE  
3. Yusuf Ibrahim  
4. Arum Tyas Ageng Ernawati
- Bagian PPh 21 dan Badan : 1. Santi Nugrahaningtyas  
2. Putri Lolalia Pita Loka

Bagian PPh 25	:	Umami Dwi Susanti, SE
Bagian PPN dan PPnBM	:	Listyowati
Bagian PPh OP	:	Meirina Lutfiani
Bagian Pengarsipan	:	Florentina Santi
Bagian Lapangan	:	Andreas Joko Sulistyanto
Bagian Penagihan	:	Mulyono

Sumber : Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto Semarang, Agustus 2019

### **Tugas dan Wewenang**

#### 1. Pimpinan

Pimpinan bertugas untuk mengawasi segala pekerjaan yang berlangsung di kantor, melayani konsultasi dengan klien yang mempunyai permasalahan terkait pajak, mendampingi dan membimbing klien dalam proses pemeriksaan pajak.

#### 2. Supervisor

Supervisor bertugas untuk mengamati dan mengawasi kinerja pegawai Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto

#### 3. Bagian Keuangan

Bagian keuangan memiliki tugas untuk mengatur keuangan Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto agar secara efektif digunakan untuk memaksimalkan keuntungan usaha seperti pembayaran gaji karyawan,

meminimalkan biaya perusahaan baik biaya operasional maupun non operasional, menerima pemasukan pendapatan perusahaan.

#### 4. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi bertugas untuk mengumpulkan segala bukti transaksi klien dan menyusun laporan keuangan usaha para klien yang menggunakan pembukuan.

#### 5. Bagian PPh 21 dan Badan

Bagian PPh 21 mempunyai tugas untuk mengerjakan penghitungan pajak penghasilan yang berupa gaji dari para klien, juga perhitungan dan pelaporan PPh yang dikenakan pada Badan Usaha yang merupakan klien.

#### 6. Bagian PPh 25

Bagian PPh 25 memiliki tugas untuk menghitung angsuran pajak tahunan Wajib Pajak dan juga pembayaran dan pelaporan klien terkait PPh 25

#### 7. Bagian PPN dan PPnBM

Bagian PPN dan PPnBM memiliki tugas untuk mengerjakan perhitungan dan pelaporan PPN dan PPnBM klien.

#### 8. Bagian Pengarsipan

Bagian pengarsipan mempunyai tugas untuk membantu divisi lain dalam penyimpanan dokumen dan mempersiapkan dokumen para klien.

## 9. Bagian Penagihan

Bagian Penagihan memiliki tugas untuk menagih honor dan tagihan pajak yang dibebankan kepada klien, selain itu bertugas untuk menyetorkan uang ke bank.

## 10. Bagian Lapangan

Bagian lapangan memiliki tugas untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dan bertugas untuk mengambil serta mengembalikan dokumen – dokumen klien yang diperlukan dalam proses penghitungan pajak dan pelaporan pajak.

Sumber : Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto, Agustus 2019.

### **Sistem kerja Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto**

Klien yang memilih untuk berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto dan menyerahkan segala urusan terkait permasalahan perpajakannya, terlebih dahulu sebelum melakukan kesepakatan kerja, kedua pihak (Klien dan Konsultan) melakukan kesepakatan terkait honor yang akan diterima pihak Konsultan dengan menandatangani surat perjanjian dan surat kuasa, kemudian Bapak Harianto akan menyerahkan tugas kepada pegawainya.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis sebagai bahan penulisan yaitu Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya. Data tersebut diperoleh melalui data-data informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan kasus yang ada. Data yang diperoleh berupa data omzet PT DEF pada Surat Pemberitahuan PPh Badan tahun pajak 2018 sebesar Rp 610.756.279, data penjualan ekspor PT DEF tahun 2018 melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2018 dan Surat Pemberitahuan PPN Masa Januari – September 2019.

### **3.2.2 Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Dokumentasi**

Dalam metode pengumpulan data penulis mengumpulkan data dengan metode dokumentasi. Metode ini merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan terkait kasus PT DEF. Sumber data berasal dari Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto.

#### **2. Metode Studi Pustaka**

Dalam metode studi pustaka penulis mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan buku-buku perpajakan seperti buku Perpajakan Indonesia karangan Siti Kurnia Rahayu dan karangan Waluyo, dan buku Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan karangan Billy Ivan Tansuria.

### 3.2.3 Analisis Data

#### 1. Metode Deskriptif Kualitatif

Dalam Metode Deskriptif Kualitatif penulis menjelaskan terkait pemberlakuan NPWP jika PT DEF memilih untuk tidak melakukan usaha lagi.

#### 2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Dalam Metode Deskriptif Kuantitatif penulis menganalisis kewajiban perpajakan PT DEF pada tahun 2019 berdasarkan omzet PT DEF pada data laporan laba rugi dan laporan keuangan PT DEF tahun 2018 dan juga berdasarkan SPT PPN tahun pajak 2018 dan 2019 dengan menggunakan penghitungan angka.

